

Kerjasama Indonesia Dengan Rusia Dalam Bidang Pertahanan Militer Pada Masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Periode 2004-2009

Rindu Faradisah Novana*

Abstract

This research analyzes the military cooperation between Indonesia and Russia in Susilo Bambang Yudhoyono's administration. This cooperation is based on the condition of Indonesian military defense that has been poorly equipped. Russian was chosen because it is a country that can compete with American and European military technology without administration fee. The focus of military defense cooperation during Susilo Bambang Yudhoyono in the 2004-2009 period is to renew and improve the condition and function the main tool of weapons system Indonesian armies.

Keywords: *Military Cooperation, Military Technology, Military Defense, Weapons System.*

Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kerjasama pertahanan militer antara Indonesia dan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam periode pemerintahan 2004-2009. Hubungan diplomatik Indonesia-Uni Soviet secara resmi sudah terjalin sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno dan pimpinan tertinggi Uni Soviet pada masa itu, Nikita Khrushchev. Uni Soviet adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia. Dinamika hubungan kerjasama terus berlanjut, Uni Soviet menganggap Indonesia sebagai sekutu yang signifikan di Asia- Pasifik.

Kejatuhan Uni Soviet dan berakhir masa Perang Dingin mempengaruhi perubahan peta politik internasional dan mempengaruhi posisi Uni Soviet dalam politik internasional. Rusia mulai bangkit sebagai negara penerus Uni Soviet di bawah pimpinan Mikhail Gorbachev. Indonesia diembargo oleh kongres Amerika Serikat dalam pembelian senjata dan hubungan kerjasama Indonesia-Rusia kembali terjalin seiring dengan bangkit kembali Federasi Rusia.

* Alumni Jurusan Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau

Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Rusia pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dimulai ketika pemerintah Rusia menawarkan kerjasama pertahanan dengan Indonesia pada tahun 2005. Indonesia dan Rusia sepakat untuk membentuk Komisi Kerjasama Teknik Militer (KKTM). Pembentukan KKTM ditandatangani dalam Sidang Komisi Pertama di Rusia pada tanggal 22 September 2005.

Penentuan dan pelaksanaan kerjasama pertahanan militer Indonesia dengan Rusia pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono sangat dipengaruhi oleh kondisi pertahanan militer negara yang mencakup perkembangan alutsista Indonesia saat ini. Walaupun Amerika telah mencabut embargo terhadap Indonesia, hal ini tidak menutup Indonesia tetap melakukan kerjasama pertahanan militer dengan Rusia, dan tetap berhubungan baik dengan Amerika Serikat. Kerjasama pertahanan ini juga bermanfaat bagi Indonesia selanjutnya, karena Indonesia tidak hanya tergantung pada satu negara saja dalam hal pengadaan peralatan teknik militer dan penyediaan persenjataan.

Kerjasama dengan Rusia bukan berarti Indonesia telah mengubah kebijakan luar negeri yang selama ini cenderung ke Barat. Tetapi, menunjukkan bahwa membuka kerjasama dengan Rusia adalah upaya pelurusan kembali praktek kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif. Indonesia tidak pernah memusuhi barat dan Amerika Serikat. Tetapi Indonesia menjaga keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan yang besar agar tidak selalu terhambat. Baik oleh hambatan politik atau hambatan lainnya.¹

Dimata negara-negara Asia Tenggara, Indonesia disebut sebagai bangsa yang besar. Besar karena luas wilayah darat dan perairannya, besar juga karena jumlah penduduknya. Jumlah alutsista (alat utama sistem senjata) untuk melakukan pengamanan, tidak sebanding dengan luas wilayah NKRI. Untuk menghadapi situasi dan perkembangan ancaman maupun bentuk perang yang tidak lagi konvensional, penguasaan atas teknologi bagi TNI merupakan suatu keharusan. Tetapi kondisi riil alutsista TNI masih sangat memprihatinkan, karena

1 Fardiansah Noor, "*DPR Dukung Penuh Kebijakan Politik Bebas Aktif*", diakses dari: www.mediaindonesia.com. Pada tanggal 3 Februari 2009.

sebagian besar alat utama sistem pertahanan mereka adalah warisan peralatan tahun 1960-an, 1970-an dan 1980-an.

Sistem persenjataan Tentara Nasional Indonesia terutama setelah hampir empat belas tahun diembargo oleh sejumlah negara produsen khususnya Amerika Serikat menunjukkan kondisi yang sudah tidak layak guna. Sudah seharusnya pemerintah meremajakan secara bertahap semua alat utama sistem senjata (alutsista) tidak layak pakai yang dapat membahayakan keselamatan prajurit. Hanya 40-50% kesiapan operasional minimum sistem persenjataan TNI saat ini diseluruh matra angkatan, persentase tersebut jauh di bawah persentase kesiapan minimal operasional TNI. Dapat dikatakan separuh kekuatan peralatan utama sistem persenjataan (alutsista) TNI tidak sanggup beroperasi maksimal. Penyebabnya, baik karena faktor usia peralatan maupun terbatasnya pengadaan komponen dan suku cadang. Alutsista yang dipakai TNI AL dan AU sampai sekarang 70 persen buatan Amerika Serikat.²

Kesenjangan antara kebutuhan dan alokasi anggaran yang ada mengharuskan Indonesia melakukan kerja sama teknologi alat-alat militer dengan negara-negara yang memiliki kemampuan teknologi kemiliteran yang jauh lebih maju daripada Indonesia. Menunggu Amerika Serikat mencabut secara penuh embargonya memerlukan waktu yang lama, sementara kebutuhan pertahanan Indonesia semakin mendesak.

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian secara kualitatif dengan menggunakan model eksplanatif analisis, yaitu bersifat menjelaskan secara rinci pokok permasalahan dan menjelaskan secara keseluruhan variabel-variabel hasil yang telah diamati berdasarkan kerangka pemikiran yang digunakan. Penelitian ini lebih ditekankan pada perkembangan politik luar negeri yang telah dibuka kembali oleh Indonesia terhadap Rusia dalam bidang pertahanan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004–2009.

Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan peneliti menggunakan studi kepustakaan (*library research*), dengan merujuk pada buku-buku, artikel, jurnal, dan berita-berita media yang relevan. Dalam mengumpulkan data-data

² Wisnu Dewabrata, *Loc. Cit.*

tersebut peneliti lebih banyak memanfaatkan media internet sebagai *source of data*, karena keterbatasan peneliti untuk mencari data-data yang original, ataupun untuk melakukan wawancara serta observasi langsung.

Untuk semakin mengarahkan penelitian ini dalam mengkaji fenomena yang ada diperlukan teori yang relevan dengan fenomena yang akan dianalisa pada penelitian ini. Dalam dimensi kebijakan luar negeri suatu negara, dikenal teori *Policy Influencer System* yang diajukan oleh William D. Coplin. Teori ini digunakan Coplin untuk menganalisis hubungan antara para pengambil keputusan politik luar negeri dengan *policy influencers* yang berada dalam konteks politik dalam negeri dan juga dalam kajian perbandingan pembuatan kebijakan luar negeri antar negara.³ Coplin memandang teori ini sebagai salah satu kunci untuk memahami efek perilaku aktor politik domestik terhadap pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dengan menganalisis hubungan keduanya. Aktor politik domestik disebut Coplin sebagai *policy influencers*.

Hubungan antara pengambil keputusan dengan *policy influencers* terjadi secara timbal balik.⁴ Di satu sisi, pengambil keputusan membutuhkan *policy influencers* karena mereka merupakan sumber dukungan baginya. Di sisi lain, *policy influencers* membutuhkan pengambil keputusan untuk mempermudah jalan tuntutan diputuskan sebagai suatu kebijakan. Apabila tuntutan *policy influencers* tidak dipenuhi pengambil keputusan, maka dapat dipastikan sebagian atau bahkan seluruh dukungan *policy influencers* kepada pengambil keputusan akan hilang. Pengambil keputusan tidak selalu menanggapi tuntutan itu secara positif. Tetapi, para pengambil keputusan pada akhirnya akan mengakomodasi sampai batas tertentu untuk bisa mengabaikan tuntutan itu.

Coplin membedakan *policy influencers* menjadi empat macam.⁵ Pertama, *bureaucratic influencer*, misalnya beberapa individu atau organisasi dalam lembaga pemerintah yang membantu para pengambil keputusan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan luar negeri. Anggota birokrasi yang bertindak sebagai *policy influencer* kadang juga menjadi pengambil keputusan.

3 William D Coplin. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* terj. M. Marbun, Edisi Kedua. Bandung: Pustaka Sinar Baru, 1992, hal. 74-76.

4 *Ibid*

5 *Ibid*

Bureaucratic influencer memiliki akses langsung kepada para pengambil keputusan dengan memberikan informasi kepada mereka sekaligus melaksanakan kebijakan luar negeri yang diputuskan. Karenanya, *bureaucratic influencer* memiliki pengaruh sangat besar dalam pengambilan keputusan.

Kedua, *partisan influencer*, kelompok yang bertujuan untuk menerjemahkan tuntutan-tuntutan masyarakat menjadi tuntutan-tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. Kelompok tersebut berupaya mempengaruhi kebijakan dengan cara menekan para penguasa dan dengan menyediakan orang-orang yang bisa berperan dalam pengambilan keputusan. Misalnya partai politik dalam sistem demokrasi.

Ketiga, *Interest influencer*, yakni sekelompok individu yang bergabung bersama karena mempunyai kepentingan yang sama. *Interest influencer* memakai beberapa metode untuk membentuk dukungan terhadap kepentingannya. Kelompok ini biasanya melancarkan kampanye dengan menulis surat yang tidak hanya diarahkan kepada para pengambil keputusan, tapi juga *bureaucratic* dan *partisan influencer*. Mereka juga bisa menjanjikan dukungan financial atau mengancam menarik dukungan. Jika tidak berperan dalam menentukan kebijakan luar negeri, *interest influencer* pasti berperan dalam mengkritisi para pengambil keputusan kebijakan luar negeri.

Keempat, *mass influencer*, yang terwujud dalam opini publik yang dibentuk oleh media massa. Para pengambil keputusan menggunakan opini publik bukan untuk membentuk kebijakan luar negeri tetapi untuk merasionalisasinya. Pendapat dari kelompok ini sering menjadi pertimbangan para pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan luar negeri. Keempat tipe *policy influencers* itu tidak selalu memiliki pandangan sama terhadap suatu kebijakan. Perbedaan juga kerap dimiliki oleh para pengambil keputusan.

Teori Coplin dapat digunakan dalam mengkaji proses pengambilan luar negeri Indonesia, yaitu begitu kuatnya pengaruh (*influence*) dari kelompok-kelompok yang berada disekitar para pembuat keputusan (*decisions maker*) dalam usaha mereka untuk meloloskan keinginan mereka agar diputuskan atau dikeluarkan menjadi sebuah kebijakan luar negeri. Dalam hal ini, *bureaucratic influencers* yang paling berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia adalah Departemen pertahanan.

Dephan yang memberikan masukan kepada Presiden untuk membuka kembali kerjasama pertahanan militer berdasarkan data-data yang dimilikinya sebagai lembaga yang mewadahi TNI dalam hal kelengkapan dan persenjataan yang bertujuan untuk ketahanan negara. Dephan sebagai salah aktor yang menerima masukan dari setiap matra TNI mengenai kondisi kelengkapan persenjataan dan peralatan yang TNI miliki dan gunakan.

Sejarah Kerjasama Indonesia-Rusia

Tahun 1956 merupakan tonggak kesepakatan perdagangan pertama antara Indonesia-Rusia. Hubungan diplomatik diantara kedua negara dimulai pada tanggal 3 Februari 1950, pada saat Uni Soviet berada dibawah pemerintahan Nikita Khrushchev dan Indonesia berada dibawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Persamaan sikap dan pandangan antara pemimpin kedua negara membuat persahabatan menjadi erat. Uni Soviet adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan RI. Pengakuan Uni Soviet terhadap kedaulatan RI diberikan pada tanggal 26 Januari 1950.

Hubungan kerjasama Indonesia dengan Rusia terjalin diberbagai bidang, seperti dalam bidang politik, ekonomi, kebudayaan, pendidikan, olahraga, dan pertahanan militer. Dalam bidang pertahanan militer, Rusia memberikan dukungan penuh terhadap Indonesia. Pada saat operasi pembebasan Irian Barat, Uni Soviet memberikan dukungan militer bagi Indonesia. Kekuatan Angkatan Laut (AL) meningkat 5 kali lipat, dengan didatangkannya peralatan tempur dari Rusia seperti: 1 buah kapal penjelajah, 8 Destroyer, 12 kapal selam, termasuk 100 Tank Amphibi PT-76. Sementara itu Angkatan Udara (AU) memiliki 160 pesawat tempur, diantaranya: 30 buah pesawat pembom jarak jauh TU-16 KS, 50 TU-16, 80 buah Jet tempur MIG-19, dan MIG-17.⁶ Dalam bidang pendidikan, kedua kepala negara sepakat untuk mendirikan Universitas Persahabatan Bangsa-Bangsa di Moskow, yang kemudian berganti nama menjadi Universitas Patrice

⁶ Kedutaan Besar Federasi Rusia Untuk RI, "*Hubungan Indonesia-Rusia*", diakses dari: www.indonesia.mid.ru. Pada tanggal 5 Maret 2009.

Lumumba. Nikita Khrushchev juga mengundang mahasiswa Indonesia untuk menuntut ilmu di Uni Soviet dengan beasiswa dari pemerintah Uni Soviet.⁷

Kejatuhan Uni Soviet dan berakhir era Perang Dingin tahun 1989 mempengaruhi perubahan peta politik internasional, termasuk mempengaruhi hubungan Indonesia-Uni Soviet. Hubungan kerjasama yang sudah terjalin di antara kedua negara mengalami pasang surut dan menjadi vakum. Pasca Uni Soviet runtuh, Rusia mulai berdiri sebagai negara pengganti Uni Soviet. Rusia bangkit sebagai negara penerus Uni Soviet dibawah kepemimpinan Mikhail Gorbachev yang mengumandangkan *Glasnot* (Keterbukaan) dan *Perestroika* (restrukturisasi).

Amerika Serikat sempat memberlakukan embargo penjualan senjata kepada Indonesia akibat terbakarnya beberapa aktivis pro kemerdekaan Timor Timor di Santa Cruz pada tahun 1991. Akibat dari insiden Santa Cruz tersebut, Amerika Serikat juga memberhentikan pengiriman personil TNI dalam program pelatihan militer di Amerika Serikat melalui program *International Military Education and Training* (IMET). Embargo tersebut mengakibatkan menurunnya kualitas kinerja TNI akibat tidak adanya perawatan dan perbaikan Alutsista yang hampir 70% berasal dari Amerika Serikat.

Presiden Megawati memprakarsai kelanjutan hubungan kerjasama dengan Rusia, Presiden Megawati ingin mengulang kembali kerjasama dan hubungan baik seperti pada masa pemerintahan ayahnya, Presiden Soekarno. Setelah pemerintahan Presiden Megawati, hubungan Indonesia-Rusia semakin membaik. Kedua kepala negara juga menandatangani Deklarasi mengenai dasar hubungan persahabatan dan kemitraan diantara Indonesia dan Rusia abad 21. Deklarasi tersebut membuka tahap baru hubungan bilateral diantara kedua negara untuk bekerjasama disemua bidang. Presiden Vladimir Putin dan Presiden Megawati menyepakati dilakukannya kerjasama militer yang lebih erat. Selain kerjasama militer, kerjasama dalam bidang ilmiah-teknik juga mengandung potensi besar.

⁷ Rudi Hartono, "*Menilai Politik Luar Negeri dan Kerjasama Indonesia-Rusia*", diakses dari: www.lmnd-online.org. Pada tanggal 25 Januari 2008.

Kerjasama Indonesia-Rusia Pada Masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2009), merupakan saat yang cukup bagus untuk melanjutkan kembali kerjasama strategis dengan Rusia yang dulu lebih dikenal dengan nama Uni Soviet. Dalam perkembangan politik luar negeri Indonesia saat ini, penting untuk memperluas mitra strategis di seluruh dunia. Rusia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi besar, diantara potensi itu adalah di bidang kerjasama pertahanan militer dan keamanan.

Kerjasama strategis Indonesia-Rusia di bidang militer dan keamanan bisa menjadi "pintu pembuka" untuk terjalinnya suatu kemitraan strategis di bidang-bidang lain di luar bidang politik dan militer. Seperti Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Secara geografis, Indonesia sangat luas, mencakup ribuan pulau dari Sumatera sampai Papua, yang menjelaskan bahwa Indonesia membutuhkan tentara moderen yang kuat untuk menjamin keamanan nasional.⁸

Pada pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Vladimir Putin pada tanggal 29 November 2006, di Rusia, disepakati bentuk kerjasama di bidang militer, politik, dan ekonomi. Di bidang ekonomi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mendorong investasi Rusia agar masuk ke Indonesia, karena Volume perdagangan kedua belah pihak pada tahun 2005 dengan perkiraan pendahuluan mencapai 680 juta Dollar AS, angka tersebut melebihi 42% hasil tahun 2004 (480 juta dolar AS). Indonesia memiliki kepentingan untuk membuka kerjasama soal energi nuklir, untuk mengatasi krisis energi yang masih terus terjadi di dalam negeri. Sedangkan disisi lain, Rusia mempunyai kepentingan untuk mengimbangi dominasi perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia terutama sektor pertambangan yang sudah meraih keuntungan sangat besar. Sedangkan di bidang militer disepakati mengenai implementasi kerjasama militer 2006-2010.⁹

Pemerintah Indonesia dan Rusia menandatangani tujuh nota kesepahaman di bidang pertahanan, politik, ekonomi dan hukum. Ketujuh nota

8 Mikhail M. Bely, "elang berkepala dua dan garuda: mereka yang mempunyai persamaan akan berkumpul bersama". diakses dari: www.indonesia.mid.ru Pada tanggal 5 Maret 2009.

9 Rudi Hartono, *Loc. Cit.*

kesepahaman yang ditandatangani yaitu, kerjasama eksplorasi luar angkasa untuk maksud damai, kerjasama penggunaan energi atom untuk maksud damai, kerjasama antar kejaksaan agung, perlindungan intelektual dalam kerjasama teknik militer. Selain itu ditandatangani juga nota kesepahaman dalam bantuan implementasi militer Rusia-Indonesia 2006-2010, pembebasan visa kunjungan singkat untuk dan kepentingan dinas dan diplomatik, dan kerjasama bidang pariwisata. Penandatanganan kesepakatan itu disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Vladimir Putin di ruang Malachite Fuyet, Istana Kepresidenan Rusia.¹⁰

Pada tanggal 6 September 2007, Presiden Putin mengadakan kunjungan resmi ke Indonesia. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan terhadap kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Desember 2006, dan merupakan kunjungan pertama dari Presiden Rusia sejak tahun 1991. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Putin ingin mengkaji ulang hubungan kerjasama yang telah terjalin sejak tahun 2003, terutama di bidang militer dan ekonomi perdagangan.

Kunjungan Presiden Vladimir Putin ke Indonesia menyaksikan penandatanganan Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama, di Istana negara. Terdapat 8 MoU dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani, yaitu:¹¹

1. MoU pemerintah RI dan pemerintah Rusia mengenai kerjasama di bidang pembatasan dari dampak negatif pada lingkungan, ditandatangani oleh Meneg LH Rachmat Witoelar dan *Head of Rostekhnadzor* K.B Pulikopsky.
2. MoU antara Kementerian Pemuda dan Olahraga RI dan Agen Federal mengenai Fisik, Budaya, dan Olahraga Federasi Rusia, tentang kerjasama pelatihan fisik dan olahraga, ditandatangani oleh Meneg Pora Adhyaksa Dault dan *Head of RosSPORT* V.A. Fetisov.

10 Nurul Qomariyah, "RI-Rusia teken 7 kesepakatan", diakses dari: www.detiknews.com. Pada tanggal 17 Mei 2010.

11 Situs resmi presiden SBY, "Kunjungan Kenegaraan Presiden Rusia", diakses dari: www.presidensby.info. Pada tanggal 5 Januari 2009.

3. Perjanjian antara pemerintah RI dan pemerintah Rusia dalam promosi dan perlindungan investasi, ditandatangani oleh Ketua BKPM M. Luthfi dan Deputi Menteri Perdagangan dan Pengembangan Ekonomi V.G Savalyev.
4. Perjanjian kerjasama antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan *The Accounts Chamber of The Russian Federation*, ditandatangani oleh Anwar Nasution dan Ketua Badan Audit Rusia S.V. Stephasin.
5. MoU antara pemerintah RI dan pemerintah Rusia kerjasama melawan terorisme, ditandatangani oleh Dirjen Amerika dan Eropa, Departemen Luar Negeri RI, Eddi Hariadhi, dan Deputy Menteri Departemen Luar Negeri Federasi Rusia A. Losyukov.
6. Kerjasama Pemerintah RI dan Pemerintah Rusia dalam perpanjangan utang negara kepada Pemerintah RI, ditandatangani oleh Dirjen Manajemen Utang Departemen Keuangan RI Rahmat Waluyo dan Deputy Menteri Keuangan Rusia A.A Storchak.
7. Program kerjasama antara Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI dan Agen Federal Bidang Kebudayaan dan Sinematografi Federasi Rusia, ditandatangani oleh Sekjen Kebudayaan dan Pariwisata Sapta Nirwandar dan Duta Besar Rusia untuk RI Alexander Ivanov.
8. Kerjasama teknik antara Departemen Keuangan RI dan Bank Kerjasama Negara untuk Pengembangan dan Ekonomi Luar Negeri (Vnesheconombank) di bidang prosedur teknik dalam hal *settlement* dan *keeping accounts*, ditandatangani oleh Dirjen Manajemen Utang Departemen Keuangan RI Rahmat Waluyanto dan Deputi Menteri Keuangan Rusia A.A. Storchak.

Bentuk kerja sama pertahanan yang akan dilakukan dengan Rusia berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain itu, juga diusahakan peningkatan kemampuan manajemen perwira dengan bersekolah setingkat Lemhannas di Indonesia atau sebaliknya. Serta peningkatan kemampuan pasukan khusus, misalnya pelatihan spesialisasi pilot pesawat dan spesialisasi pilot kapal selam.

Rusia memberikan pinjaman *state credit* 1 miliar dollar AS bagi pengadaan persenjataan Indonesia untuk masa 2006-2010. Kredit negara ini mempunyai keunggulan berupa efisiensi, karena tidak memakai *management fee* dan syarat lainnya. Departemen pertahanan RI menggunakan pinjaman yang diberikan Rusia untuk pengadaan 10 helikopter MI-17-V5 dan 5 Helikopter MI-35P beserta persenjataannya bagi TNI AD untuk kebutuhan helikopter serbu dan transportasi; 2 kapal selam kelas kilo dan 20 kendaraan infanteri tempur BMP-3F untuk TNI AL; TNI AU yang menjadi prioritas, akan melengkapi satu skuadron pesawat tempur Sukhoi, dimana sebelumnya Indonesia telah memiliki 4 Sukhoi. Setelah 4 Sukhoi di persenjatai, maka akan dilanjutkan dengan pengadaan 6 Sukhoi, terdiri dari 3 unit Sukhoi SU-27 dan 3 unit Sukhoi SU-30, serta 6 paket peralatan avionik dan persenjataan Sukhoi TNI AU.¹²

Penawaran *State Credit* sebesar 1 Milyar Dollar AS dari Pemerintah Rusia memiliki periode selama 5 tahun (2006-2010) yang nantinya diambil dari *State Credit* yang sudah disepakati Pemerintah Indonesia untuk keseluruhan kebutuhan alutsista TNI sebesar 3,7 Milyar Dollar AS sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Jadi total *State Credit* sebesar 3,7 Milyar Dollar yang akan diperuntukan untuk memenuhi keseluruhan kebutuhan alutsista TNI periode tahun 2004-2009, sebesar 1 Milyar Dollar AS nantinya khusus digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari Rusia, sedangkan sisanya sebesar 2,7 Milyar Dollar AS rencananya akan digunakan untuk memenuhi pengadaan alutsista dari negara-negara lain, seperti Amerika, Polandia, India, China dan Australia.¹³

Teknis dari proses pembelian alutsista akan dilaksanakan secara bertahap dari tahun pertahun, sehingga dapat diperkirakan sekitar 250-300 Juta Dollar per tahunnya akan diambil dari *State Credit* 1 Milyar Dollar AS selama jangka waktu 5 tahun. Untuk pembayaran tahun pertama sekitar 220 Juta Dollar AS, uang mukanya akan dibayarkan Menteri Keuangan sebesar 16,4 Juta Dollar dan dilaksanakan tahun 2007, tergantung pencairan APBN. Dijelaskan pula, dari sekitar 70 persen total *State Credit* 1 Milyar Dollar AS tersebut akan dipergunakan

¹² Situs resmi presiden SBY, "*Pengadaan Sukhoi adalah Bagian dari Politik Bebas Aktif Indonesia*", diakses dari: www.presidensby.info. Pada tanggal 7 Desember 2009.

¹³ Defense studies, "*Penawaran State kredit dari pemerintah Rusia untuk Pengadaan Alutsista TNI disetujui Presiden*". Diakses dari: defense-studies.blogspot.com. Pada tanggal 1 November 2010.

untuk pengadaan alutsista, antara lain pesawat tempur Sukhoi, Kapal Selam “Kilo Class” dan Helikopter Serbu.

Sistem kredit negara antara Indonesia dengan Rusia, dilakukan dengan cara yang sederhana tidak berbelit-belit dan tanpa perantara. Misalnya, Dephan ingin membeli sebuah alutsista dari Rusia, setelah mendapat persetujuan dari Departemen Keuangan (Depkeu), maka Dephan RI langsung dengan Dephan Rusia yang memiliki kewenangan untuk menunjuk salah satu perusahaan Rusia yang akan memproduksi alutsista yang dibutuhkan RI, misalnya perusahaan Rosoboroneksport. Sehingga Rosoboroneksport yang akan berhadapan dengan Dephan RI. Rosoboroneksport punya instansi pendukung lain dalam hal administrasi, seperti pengkapalan, dan angkutan.

Memanfaatkan pinjaman Rusia untuk memperkuat alat pertahanan di Indonesia memberi keuntungan bagi Indonesia ditengah tengah krisis pendanaan untuk pembaruan maupun pemeliharaan alat pertahanan, Pembelian persenjataan melalui kredit dari Rusia ini sangat dibutuhkan untuk memperkuat Tentara Nasional Indonesia dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Penambahan persenjataan tempur akan memberikan efek penghambat kepada negara-negara lain yang mencoba mengusik kedaulatan wilayah Indonesia.

Pengadaan alutsista dari Rusia merupakan pilihan rasional saat industri strategis dalam negeri belum bisa memenuhi kebutuhan kelengkapan peralatan dan teknologi militer. Menggunakan produk Amerika Serikat atau Eropa, selain harganya lebih mahal juga selalu ada hambatan politis yang bisa menyulitkan Indonesia di masa mendatang. Rusia umumnya tidak sulit soal lisensi, izin dan politik. Pembelian alutsista dari Amerika Serikat dan Uni Eropa, umumnya dirumitkan dengan persyaratan penegakan HAM (dikaitkan masalah Aceh, Poso atau Papua), masalah lisensi, dan prosedur pembelian yang rumit. Pengalaman dengan Inggris misalnya, tank Scorpion dan panser serbu Stromer untuk operasi menumpas Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak boleh dipakai di Aceh karena terkait syarat kerjasama hanya untuk pertahanan luar.¹⁴

¹⁴ Antara, *“RI-Rusia Jajaki Kerjasama Teknologi Pertahanan”*, diakses dari: www.antara.co.id. Pada tanggal 3 Maret 2008.

Kerjasama pembelian perlengkapan militer dari Rusia dinilai paling menguntungkan. Selain prosesnya tidak rumit, pembelian langsung pada badan yang ditunjuk pemerintah dapat menghemat anggaran 40 persen, karena tanpa melalui pialang. Sistem pembayaran yang diajukan pemerintah Indonesia salah satunya dengan sistem imbal beli alutsista. Imbal beli alutsista dengan komoditas batubara misalnya, adalah memberikan kesempatan bagi pemerintah dan pengusaha Rusia untuk berinvestasi dalam eksplorasi batubara di Indonesia, bukan menukar komoditas batubara dengan alutsista.¹⁵

Rusia dalam menjual produk pertahanan militer sama kualitasnya dengan produk yang Rusia sendiri gunakan, tidak ada istilah *downgrade*. Tidak seperti Amerika Serikat, setiap produk yang dijual, beberapa fitur dikurangi karena takut kalah saing. Rusia juga tidak keberatan dalam hal transfer teknologi dan modifikasi teknologi yang dilakukan oleh Indonesia. Sebagai contoh pada saat pembelian sukhoi oleh Indonesia, pihak Rusia lupa menyertakan adaptor pengisian BBM pesawat, akhirnya teknisi Indonesia melakukan sedikit modifikasi pada adaptor pengisian BBM milik A-4 Skyhawk, dan akhirnya Sukhoi bisa terbang perdana dari pangkalan TNI AU. Pihak Rusia sama sekali tidak keberatan dengan hal ini.

Beberapa alasan Indonesia memilih Rusia sebagai negara produsen persenjataan militer terbaru bagi TNI. Pertama, sejarah hubungan militer Indonesia-Rusia. Kedua, kemudahan persyaratan kerjasama bidang pertahanan militer dari Rusia. Ketiga, Rusia lebih fleksibel mengenai harga seperti bisa dibayar dengan komoditi yang dimiliki Indonesia. Keempat, Rusia memiliki teknologi militer yang sepadan dengan Eropa dan USA.¹⁶ Rusia memiliki kekuatan infantri yang dapat diunggulkan sehingga Indonesia dapat mengadopsi sistem militer melalui kerjasama yang dilakukan sekarang.

Kerjasama dengan Rusia, tidak hanya sebatas kerjasama saja, tetapi belajar dan menyerap ilmu-teknologi dari Rusia. Rusia dikenal memiliki reputasi sebagai negara yang cukup efektif dalam alih teknologi. Negara India dan Cina telah memproduksi pesawat tempur berkat kerjasama teknik militer dengan Rusia.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Bambang H, "Indonesia Mempererat Hubungan Militer Dengan Rusia", diakses dari: www.politikindonesia.com. Pada tanggal 3 Maret 2010.

Indonesia juga berharap dengan kerjasama pertahanan militer dengan Rusia dapat seperti negara India dan Cina.

Bagi Indonesia, inovasi sistem pembelian senjata penting dilakukan. Untuk mengurangi beban devisa dan efek-efeknya pada neraca pembayaran, serta menstimulasi perkembangan industri pertahanan domestik. Inovasi tersebut harus menjadi bagian dari mekanisme transisi pendanaan pengadaan persenjataan. Karenanya, embargo tidak lagi menjadi hal yang menakutkan. Rusia bersedia menerima pembayaran pembelian alutsista dan kelengkapannya melalui sistem imbal beli.

Proyek pengadaan alutsista dari Rusia oleh Dephan, dari tahun ke tahun terus meningkat, tidak sebatas pengadaan skuadron tempur Sukhoi untuk TNI AU, tetapi juga untuk alutsista TNI AL dan TNI AD. Anggaran untuk tahun 2008, sejumlah proyek pengadaan bernilai trilyunan rupiah akan ditenderkan. Seperti pengadaan dua kapal selam kelas Kilo, enam kendaraan tempur Marinir, dan empat helikopter serbu untuk TNI AD.¹⁷

Kerjasama dengan Rusia merupakan salah satu cara Indonesia untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap Amerika Serikat dalam bidang persenjataan yang saat ini sudah mencapai 70 persen. Akibat embargo militer Amerika Serikat terhadap Indonesia hampir empat belas tahun, mengakibatkan kondisi alutsista TNI buatan Amerika Serikat sangat buruk, karena tidak adanya pemeliharaan dan perawatan suku cadang dari Amerika Serikat. Beberapa Alutsista buatan Amerika Serikat yang digunakan oleh TNI berakhir dengan kecelakaan yang menewaskan para prajurit TNI yang sepatutnya tewas karena membela tanah air Indonesia, bukan tewas akibat sistem yang sudah kadaluarsa.¹⁸

Pasca pencabutan embargo militer oleh Amerika Serikat terhadap Indonesia, kini TNI sangat selektif dalam kerjasama. Ada syarat jika menawarkan pengadaan senjata kepada Indonesia, yakni tidak ada syarat politik atau

17 Luhur Hertanto, "*Persenjataan Rusia untuk Jaga Keseimbangan*", diakses dari: us.detiknews.com. Pada tanggal 5 April 2010.

18 Wisnu Dewabrata, "*Kerjasama Militer, Embargo Senjata dan Kondisi Alutsista TNI*", diakses dari: www.melanesianews.org. Pada tanggal 11 Januari 2010.

embargo. Indonesia menganut sistem baru dalam pengadaan persenjataan militer. Sistem yang paling utama yakni pembelian persenjataan dilakukan langsung oleh pemerintah Indonesia tanpa melalui perantara.

Sasaran pengadaan alutsista serta pemeliharanya pada Tahun Anggaran 2004-2009 adalah meningkatnya jumlah dan kondisi peralatan pertahanan agar mampu menyelenggarakan pertahanan negara secara terpadu dan berkelanjutan sesuai skala prioritas ke arah pertahanan yang integratif matra darat, laut, dan udara. Terkait hal tersebut perlu mengganti alutsista yang sudah habis masa usia pakainya dengan persenjataan berteknologi tinggi terkini dengan mempertahankan kondisi alutsista untuk memperpanjang usia pakainya untuk meningkatkan kualitas senjata guna mencapai kekuatan pokok minimum.¹⁹

Kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia dalam pengadaan peralatan militer diharapkan menjadi model kerjasama militer selanjutnya bagi kedua negara. Pengadaan alutsista di Indonesia akan dilakukan secara berjenjang. Pengamatan dilakukan angkatan, pengajuan dilakukan Mabes TNI, dan keputusan diambil Dephan. Rusia dan Indonesia saling membutuhkan satu sama lain. Dengan tujuan yang sama, perdamaian dunia, keamanan dan kemakmuran.

Perjanjian internasional di bidang militer pada kurun waktu 2004-2009:²⁰

1. *Minutes of Meeting Between the Republic of Indonesia and the Russian Federation to Promote Bilateral Cooperation in Defense and Security.* (Catatan Pertemuan Antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia Mengenai Peningkatan Kerjasama Bilateral di Bidang Pertahanan dan Keamanan) Jakarta, 17 September 2004).
2. *Memorandum of Understanding Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation*

19 Departemen Pertahanan, "*Kenaikan Anggaran Pertahanan 2010 Fokus ke Alutsista*", diakses dari: www.dephan.com. Pada tanggal 1 November 2010.

20 Departemen Luar negeri RI, "*daftar perjanjian internasional Rusia-Indonesia*", diakses dari: www.deplu.go.id. Pada tanggal 5 Maret 2009.

on Assistance in Implementation of the Program of the Indonesia-Russian Military-Technical Cooperation for 2006-2010. (Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Bantuan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Kerjasama Teknik-Militer Indonesia-Rusia Tahun 2006-2010). Moscow, 1 Desember 2006.

3. *Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Russian Federation on Mutual Protection of Rights to the Results of Intellectual Activity Applied and Obtained in the Course of Bilateral Military-Technical Cooperation.* (Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia Mengenai Perlindungan Timbal Balik Atas Hak-Hak Hasil Aktifitas Intelektual yang Diterapkan dan Diperoleh Dalam Rangka Kerjasama Bilateral Teknik-Militer.) Moscow, 1 Desember 2006.

Simpulan

Dalam kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Rusia, tercapai kesepakatan tentang bantuan dalam rangka implementasi kerjasama militer 2006-2010. Pemerintah Rusia bersedia membantu militer Indonesia untuk pengadaan persenjataan. Diantaranya Rusia memberikan pinjaman lunak sebesar 1 Miliar US\$ untuk Indonesia guna membeli alutsista TNI. Penjualan pesawat tempur dan persenjataan Rusia merupakan produk terbaru dan efektif, dengan harga yang lebih murah dan persyaratan yang mudah dibandingkan produk-produk persenjataan yang berasal dari negara-negara Eropa Barat dan Amerika.

Kondisi alutsista TNI sangat memprihatinkan dan sangat tidak memadai untuk mengamankan seluruh wilayah Indonesia. Banyak alutsista yang tidak berfungsi dengan baik dan rusak sehingga mengakibatkan pertahanan militer Indonesia menjadi semakin melemah. Karena itu kerjasama pertahanan sangat perlu dilaksanakan. Kerjasama militer kedua negara tersebut antara lain berupa penjualan senjata dan alat pertahanan buatan Rusia kepada Indonesia. Selain

kerjasama teknis dan jual-beli senjata, kedua negara itu juga sepakat menggelar pelatihan bersama dan pendidikan perwira Indonesia di Rusia, atau sebaliknya.

Secara jangka panjang, kebijakan pengadaan alutsista membangun keseimbangan hubungan antara negara-negara besar yang menjadi mitra strategis Indonesia. Pengadaan peralatan militer buatan AS, UE, Cina atau Australia tetap dilanjutkan sesuai kebutuhan masing-masing angkatan. Tetapi merujuk pengalaman pahit embargo senjata dari AS dan sekutunya, dengan sendirinya Indonesia menyesuaikan diri.

Indonesia telah mendapat pelajaran yang berharga dari embargo militer AS. Akibat embargo tersebut menimbulkan keinginan Indonesia untuk mencegah ketergantungan atas satu penyedia perlengkapan militer. Selain itu, sebagai sebuah negara kepulauan, Indonesia harus menaruh perhatian besar pada Angkatan Laut dan Angkatan Udaranya. Saat ini, Rusia yang diakui banyak pihak sebagai pemain unik dari pasar senjata dunia dapat menjadi partner paling menjanjikan bagi Indonesia.

Di satu sisi, Rusia mewarisi potensi teknologi militer yang luar biasa dan merupakan satu-satunya negara di dunia, selain AS, yang memiliki kemampuan dalam membangun dan memproduksi seluruh elemen penting dari persenjataan modern. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Rusia tidak memiliki cukup uang untuk mendanai sepenuhnya potensi industri pertahanan Rusia. Dengan demikian, atas dasar usaha mempertahankan tujuan utamanya, industri pertahanan Rusia tertarik untuk mengekspor produknya. Sebagai contoh, penjualan ekspor tahun 2005 terdiri atas 60% dari total produksi Almaz-Antey, perusahaan yang saat ini menduduki posisi 30 dalam peringkat US Defense News yang memasukkan 100 perusahaan pertahanan top dunia.

Rusia menawarkan persenjataan mereka pada harga yang rendah tanpa persyaratan politik apa pun. Mereka juga siap mengikuti mekanisme barter, pertukaran komoditas dan dapat menawarkan program kredit sebagaimana yang telah diterapkan dalam perjanjian penjualan MiG dan Sukhoi kepada Indonesia dan Malaysia.

Sebagai sebuah kekuatan benua, Rusia memiliki kondisi alam yang andal dan memungkinkan bagi produksi peralatan tempur murah dengan tingkat efektivitas tempur yang tinggi. Pada waktu yang bersamaan Rusia juga telah

menciptakan senjata anti tank modern jarak jauh yang mematikan. Peralatan tempur yang akan dibeli oleh Indonesia dari Rusia memiliki sejumlah keunggulan termasuk daya tangkal dan kemampuan teknologinya yang sesuai dengan kebutuhan. Peralatan tempur yang akan dibeli pada periode 2006-2010 termasuk enam pesawat tempur Sukhoi, dua kapal selam dan sembilan helikopter.

Secara politik, ini akan memberikan ruang gerak bagi Indonesia agar tidak bergantung pada Amerika Serikat jika suatu waktu nanti negara Amerika Serikat menjatuhkan embargo kembali. Kerja sama pertahanan dengan Rusia akan membuka jalan bagi Indonesia atas akuisisi teknologi militer modern, bahkan hingga kepada produksi bersama atas senjata-senjata baru, seperti India dan Cina, dan tidak akan ada biaya-biaya politik atas kerja sama tersebut.

Kerjasama dengan Rusia, bukan hanya memanfaatkan uang, teknologi pesawat, tetapi memindahkan kekuatan teknologi udara Rusia ke Indonesia adalah cita-cita agar Indonesia tidak hanya menjadi pemilik teknologi, tetapi juga menguasai, sehingga Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di Asia Tenggara, sekaligus mengembalikan kejayaan pertahanan tahun 1960-an yang pernah diukir oleh Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi adalah kerjasama ini dimanfaatkan untuk pengembangan teknologi, transfer teknologi dan berbagi teknologi.

Beberapa perjanjian Indonesia-Rusia dalam kerjasama pertahanan militer yang telah terealisasi adalah terwujudnya pembelian Helikopter Mi-17 yang diserahkan Dephan kepada TNI AU, serta dua pesawat tempur Sukhoi yang tiba di Lanud Sultan Hasanuddin, Makasar. Berdasarkan hal tersebut, perjanjian yang belum terealisasi adalah penambahan 2 buah kapal selam kilo class dan Tank BMP-3F untuk TNI AL.

Secara umum, perbandingan keuntungan kerjasama Indonesia-Rusia dan Indonesia-Amerika Serikat, adalah: (1). Rusia anti embargo, sedangkan Amerika rawan embargo. (2). Rusia dalam pembelian peralatan pertahanannya bisa dinego, misalnya sukhoi bisa dinego dengan imbal beli sembako; sedangkan Amerika sulit melakukan negosiasi atas penjualan semua peralatan pertahanannya. (3). Rusia tidak mempunyai banyak persyaratan jual beli dibandingkan Amerika, Rusia menyerahkan hak pakai sepenuhnya pada Indonesia atas semua peralatan militer yang dibeli, tidak seperti Amerika yang penggunaan peralatan

militer harus sesuai syarat dari negaranya, terkait masalah HAM, misalnya (4). Produk peralatan militer yang dijual Rusia, mempunyai kualitas dan fungsi yang sama dengan Rusia sendiri gunakan; tidak seperti Amerika yang mengurangi beberapa fungsi dari peralatan tempur yang dibeli karena takut kalah saing. (5). Rusia tidak keberatan soal transfer teknologi, hal ini sudah berhasil di negara India dan Cina. Serta Rusia juga tidak keberatan akan modifikasi peralatan tempur yang dibeli, seperti pada saat pembelian Sukhoi oleh Indonesia, pihak Rusia lupa menyertakan adaptor pengisian BBM pesawat, akhirnya teknisi Indonesia melakukan sedikit modifikasi pada adaptor pengisian BBM milik A-4 Skyhawk, dan Sukhoi akhirnya bisa terbang perdana dari pangkalan TNI AU. Pihak Rusia sama sekali tidak keberatan dengan hal ini.

Daftar Pustaka

- Coplin, William D. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis terj. M. Marbun*, Edisi Kedua. Bandung: Pustaka Sinar Baru, 1992.
- Hasyim Djalal. 1990. *Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa*. Jakarta: CSIS.
- Holsti, K.J. 1992. *Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis*. Bandung: Bina Cipta.
- Jackson, Robert dan George Sorensen. 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Malikul Kusno. 2006. *Hubungan Indonesia-Rusia*, dalam Fajar baru Indonesia Rusia, Artikel, Laboratorium Politik Universitas Muhammadiyah, Jakarta.
- Plano, Jack C dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Jakarta: Putra A Bardin.
- Suffi Yusuf. 1989. *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hazairin Pohan, Direktur Eropa Tengah dan Timur Departemen Luar Negeri Indonesia, Diskusi Deplu dengan Grup Kerjasama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Rusia: Indonesian-Russian Strategic Partnership Relation in the 21st Century, Paper seminar, Jakarta: 2006, hal.13
- Suara Angkasa: Dispen AU